Analisis Pembangunan Manusia Kecamatan Kota Depok 2021

kerjasama

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Depok

Departemen Statistika - FMIPA
Institut Pertanian Bogor

Analisis Pembangunan Manusia Kecamatan Kota Depok 2021

Analisis Pembangunan Manusia Kecamatan Kota Depok 2021

Ukuran Buku / *Book Size*	: 28 Cm × 21.5 Cm
Jumlah Halaman / *Total Size*	: 40 Halaman / *page*
Naskah / *Manuscrift*	: Departemen Statistika IPB, Bogor
Gambar Kulit dan Setting / *Cover Design and Setting*	: Departemen Statistika IPB, Bogor

Diterbitkan Oleh / *Published By*:
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok

KATA SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Analisis Pembangunan Manusia Kecamatan Kota Depok Tahun 2021 dapat diterbitkan.

Buku Analisis Pembangunan Manusia Kecamatan Kota Depok Tahun 2021 memuat nilai Indeks Pembangunan Manusia tingkat Kecamatan di Kota Depok sebagai gambaran kualitas manusia di masing-masing kecamatan, dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan dan konsumsi/pengeluaran. Buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan sumber daya manusia, mengingat bahwa Kota Depok memiliki keterbatasan sumber daya alam sehingga pembangunan sumber daya manusia menjadi fokus tersendiri. Selain itu pada jangka panjang, investasi pada sumber daya manusia akan memberikan timbal balik yang cukup besar untuk suatu wilayah di berbagai bidang termasuk ekonomi. Buku ini juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak, baik masyarakat maupun institusi pemerintah dan swasta.

Kepada Departemen Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor yang sudah banyak membantu dalam penyusunan buku ini disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih, juga kepada semua pihak yang telah berperan dalam penerbitan Buku Analisis Pembangunan Manusia Kecamatan Kota Depok Tahun 2021 disampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Depok, 21 Oktober 2021
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Depok,

Drs. Manto, M.Si
NIP. 19670504 198612 1 002

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pembangunan ekonomi menjadi pusat perhatian dalam melihat kemajuan suatu wilayah karena dipandang berhubungan dengan kemampuan pemenuhan hajat hidup masyarakat secara keseluruhan. Untuk mencermati perkembangan pembangunan ekonomi di suatu daerah, dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Buku **Analisis Pembangunan Manusia Kecamatan Kota Depok Tahun 2021** ini dimaksudkan untuk menyediakan estimasi data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan metode baru di 11 (sebelas) kecamatan di Kota Depok. Nilai IPM tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan kualitas penduduk di masing-masing kecamatan. Hasil kajian dan analisis pada buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan kebijakan pembangunan manusia antar kecamatan.

Kami berterima kasih kepada Pemerintah Kota Depok, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika yang memberikan kepercayaan kepada Departemen Statistika - FMIPA, Institut Pertanian Bogor, untuk bekerjasama menyusun buku ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak-pihak lain, khususnya Badan Pusat Statistik yang menjadi sumber data utama.

Atas nama Departemen Statistika - FMIPA IPB, kami menghaturkan permohonan maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksaan kegiatan dan hasil yang diperoleh. Mudah-mudahan buku ini dapat memberikan kontribusi dalam perencanaan pembangunan secara umum di Kota Depok.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bogor, 21 Oktober 2021

Ketua Departemen Statistika

FMIPA – IPB University

Dr. Anang Kurnia

NIP. 197308241997021001

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Maksud dan Tujuan 5

BAB II METODOLOGI 6

2.1 Kerangka Pikir 6

2.2 Metodologi Survei 7

2.2.1 Penyusunan Instrumen Survei 7

2.2.2 Pemilihan lokasi dan objek survei 8

2.2.3 Metode Pengumpulan Data 13

2.3 Metode Penjaminan Mutu Data 15

2.3.1 Persiapan Survei 15

2.3.2 Pelaksanaan Survei 16

2.3.3 Entry Data 17

2.4 Analisa Data 17

2.4.1 Statistika Deskriptif 18

2.4.2 Pendugaan langsung Indeks Pembangunan Manusia tingkat kota 18

2.4.3 Pendugaan tak langsung Indeks Pembangunan Manusia tingkat kecamatan 18

2.5 Perhitungan IPM Level Kecamatan 19

BAB III INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

KECAMATAN KOTA DEPOK.....27

3.1 Urgensi IPM.....27

3.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok 28

3.3 Angka Harapan Hidup 29

3.4 Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah 31

3.5 Harapan Lama Sekolah.....32

3.6 Pengeluaran Perkapita.....33

3.7 Indeks Pembangunan Manusia Kecamatan di Kota Depok.....34

BAB IV PENUTUP.....36

4.1 Kesimpulan 36

4.2 Saran 37

BAB V TIM PENULISAN BUKU 39

DAFTAR PUSTAKA 40

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data sekunder dan sumber data 7
Tabel 2.2 Sebaran Banyak Kelurahan Setiap Kecamatan di Kota Depok 10
Tabel 2.3 Sebaran Jumlah Sampel kelurahan 10
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk setiap Kecamatan di Kota Depok 12
Tabel 2.5 Sumber data dalam pengukuran IPM.....19
Tabel 3.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok.....29
Tabel 3.2 Angka Harapan Hidup Kota Depok yang Dirinci Berdasarkan Kecamatan Tahun 2016-2021* (dalam Tahun) 30
Tabel 3.3 Rata-rata Lama Sekolah di Kota Depok Berdasarkan Kecamatan Tahun 2016-2021* (dalam Tahun).....32
Tabel 3.4 Harapan Lama Sekolah di Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun 2016-2021* (dalam Tahun).....33
Tabel 3.5 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan di Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun 2016-2021* (dalam Rp. Ribu) 33
Tabel 3.6 Indeks Pembangunan Manusia Kecamatan di Kota Depok 35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Disain Penentuan Obyek Survei dan Lokasinya 9
Gambar 2.2 Hubungan antara ukuran contoh (sampel) dengan *error* pendugaan .14
Gambar 2.3 Skema *systematic random sampling* 15

BAB - I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan manusia tidak terlepas dari manusia sebagai insan dan sumberdaya pembangunan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan. Peningkatan mutu sumber daya manusia adalah suatu keharusan, yang tidak saja bertumpu pada tanggung jawab pemerintah (negara) namun merupakan tanggung jawab semua pihak baik keluarga dan masyarakat.

Kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi akan menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing bangsa, pembangunan nasional diarahkan untuk mengedepankan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Artinya, faktor pembangunan manusia (SDM) harus menjadi pokok perhatian di semua sektor pembangunan.

Pembangunan manusia adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas peluang penduduk untuk mencapai hidup layak (*enlarging the choice of people*), yang secara umum dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dasar dan daya beli.

Otonomi daerah yang merupakan proses desentralisasi tampaknya telah membuka potensi-potensi wilayah untuk berkembang secara aktif dan mandiri. Kompetisi antar wilayah makin dinamis sebagai ajang adu kebijakan pembangunan manusia yang efektif dan efisien. Tinggi rendahnya nilai IPM tidak dapat dilepaskan dari program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Namun perlu disadari, perubahan atau peningkatan angka IPM tidak bisa terjadi secara instan. Pembangunan manusia merupakan sebuah proses dan tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Berbeda dengan pembangunan ekonomi pada umumnya, hasil pembangunan pendidikan dan kesehatan tidak bisa dilihat dalam jangka pendek. Untuk itu, program-program pembangunan manusia harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus dipantau pelaksanaannya sehingga lebih terarah.

Bicara mengenai keberhasilan pembangunan tidak lagi terbatas pada alat ukur yang sudah ada seperti PDRB, pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, tetapi

telah mengarah kepada objek pembangunan itu sendiri berupa pembangunan manusia dengan berpedoman pada empat pilar yaitu produktivitas (*Productivity*), pemerataan (*Equity*), kesinambungan (*Sustainability*) dan pemberdayaan (*Empowerment*). Untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan, tentunya dibutuhkan masyarakat yang tidak hanya unggul dalam segi kuantitas, tetapi juga unggul dari segi kualitas. Mengutip dari *Human Development Report* (HDR) yang dipublikasikan oleh UNDP tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia dari berbagai perspektif digunakan berbagai indikator seperti PDRB, *Gini Ratio* dan Indeks Pembanguan Manusia (IPM). Badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks komposit yang terdiri dari komponen indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks standar hidup layak. Maka pembangunan manusia memandang semua program kegiatan pembangunan harus dipusatkan pada upaya-upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kemajuan (*achievement*), kapasitas (*capability*), dan kebebasan (*freedom*) manusia sesuai dengan arah reformasi. Oleh karena itu, indikator komposit Indeks Pembangunan Manusia bisa dijadikan alat untuk melihat, merencanakan dan menganalisis pembangunan manusia.

Indeks ini dibentuk berdasarkan empat indikator yaitu angka harapan hidup, angka harapan laman sekolah, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli. Indikator angka harapan hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH merepresentasikan dimensi umur panjang dan sehat. Selanjutnya, angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mencerminkan output dari dimensi pengetahuan. Adapun indikator kemampuan daya beli digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak. Luasnya cakupan pembangunan manusia menjadikan

peningkatan IPM sebagai manifestasi dari pembangunan manusia dapat ditafsirkan sebagai keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan dalam memperluas pilihan-pilihan 4 Indeks Pembangunan Manusia.

Pemerintah Kota Depok telah melaksanakan kebijakan pembangunan di berbagai bidang, khususnya yang menyangkut peningkatan kualitas hidup dan sumber daya manusianya. Dalam merumuskan kebijakan pembangunan hingga tingkat kecamatan, perlu diperhatikan tingkat pencapaian setiap tahun. Karena itu kajian tentang pencapaian upaya pembangunan manusia di tingkat kecamatan perlu dilakukan dalam suatu periode tertentu, yang memberi kesempatan untuk mengkaji dampak dari program bagi peningkatan kapasitas dasar penduduk di masing-masing kecamatan di Kota Depok.

Untuk melihat sejauh mana pengaruh dan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan terhadap kesejahteraan rakyat, tentunya harus diketahui apa sajakah yang menjadi indikator kesejahteraan rakyat. Adapun indikator kesejahteraan rakyat antara lain:

- Kependudukan

Salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan adalah masalah kependudukan yang mencakup jumlah, komposisi, distribusi, pertumbuhan dan beban ketergantungan. Dimana kelima hal tersebut saling berkaitan antara satu dan lainnya. Permasalahan kependudukan akan terus membebani proses pembangunan secara menyeluruh jika kualitas sumber daya manusia yang terbentuk masih rendah.

- Pendidikan

Pendidikan sesungguhnya adalah upaya sadar seseorang atau masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta memperluas wawasan. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan kebutuhan zaman. Penduduk dengan kemampuannya sendiri diharapkan dapat meningkatkan partisipasinya dalam berbagai kegiatan, sehingga di masa mendatang mereka dapat hidup lebih layak. Dalam konteks ini, pendidikan adalah suatu sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Pendidikan merupakan elemen penting pembangunan dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Tidak itu

saja, pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup individu, masyarakat dan bangsa. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin baik kualitas sumber dayanya. Indikator yang digunakan untuk mengukur partisipasi pendidikan diantaranya adalah Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), tingkat pendidikan yang ditamatkan dan angka partisipasi sekolah (APS). Partisipasi sekolah penduduk di dalam IPM metode baru digambarkan oleh Harapan Lama Sekolah (HLS).

- Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Indikator kesehatan antara lain angka harapan hidup, keluarga berencana dan kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan antara lain dapat dilihat dari kualitas dan fasilitas fisik perumahan termasuk didalamnya sanitasi perumahan dan lingkungan, ketersediaan air besih dan kondisi fisik perumahan (misalnya: jenis lantai, atap dan dinding).

- Ekonomi

Indikator ekonomi terdiri dari kemampuan daya beli masyarakat, dan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat.

Empat Indikator Kesejahteraan rakyat (Inkesra) tersebut erat kaitannya dengan Indikator Pembangunan Manusia (IPM) dimana IPM merupakan suatu indeks komposit yang dibentuk dari tiga komponen yang terdapat dalam Inkesra yaitu: Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi.

Untuk melihat perkembangan pembangunan manusia 2021, dipandang perlu untuk menyusun Kajian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan Kota Depok Tahun 2021.

1.2 Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan Buku Analisis Pembanguan Manusia (IPM) Kecamatan Kota Depok Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan estimasi data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan metode baru di 11 (sebelas) kecamatan di Kota Depok yang dapat menjelaskan kualitas penduduk di masing-masing kecamatan.
2. Menyediakan estimasi data IPM per kecamatan sehingga memungkinkan untuk membandingkan antar kecamatan untuk memberikan gambaran tentang tingkat kemajuan suatu kecamatan relatif terhadap kecamatan lainnya.

BAB II
METODOLOGI

2.1 Kerangka Pikir

Pengukuran IPM dibentuk oleh 3 komponen berdasarkan empat indikator yaitu angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli. Lebih lanjut, IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan (yang dibangun dari indikator angka harapan lama sekolah serta rata-rata lama sekolah) dan indeks kemampuan daya beli. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain, artinya untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya. Oleh karena itu setiap komponen IPM harus distandarisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM.

Kajian Penentuan Indeks Pembangunan Manusia di 11 Kecamatan di Kota Depok dilakukan melalui kajian survei untuk memperoleh data primer dari masyarakat, pemodelan dan analisis data survei serta data sekunder. Khusus untuk Kota Depok, saat ini informasi IPM yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah pada level Kota Depok, karena data-data survei pada level kecamatan tidak memadai. Dengan jumlah 11 kecamatan dan 63 kelurahan yang ada di Kota Depok maka survei data-data terkait dengan pengukuran IPM membutuhkan dana dan usaha yang sangat besar. Oleh karena itu perlu dilakukan pengukuran dengan penggunaan metode pendugaan area kecil (*small area estimation*). *Small Area Estimation* (SAE) adalah suatu teknik statistika untuk menduga parameter-parameter sub populasi yang ukuran sampelnya (contoh) kecil, sedangkan area kecil didefinisikan sebagai himpunan bagian dari populasi (sub populasi) yang ukuran contohnya kecil dengan suatu peubah tertentu yang menjadi perhatian (Rao dan Molina, 2015).

2.2 Metodologi Survei

2.2.1 Penyusunan Instrumen Survei

Kegiatan survei pada kajian ini dilakukan melalui wawancara terhadap rumah tangga dan instansi terkait. Tabel 2.1 memperlihatkan hubungan data yang dibutuhkan untuk pengukuran atribut IPM dan kepemilikan data tersebut. Dengan demikian dalam pelaksanaannya harus menggunakan instrumen yang tepat untuk menggali semua data dan informasi yang diperlukan sehingga data tersebut dapat diolah dengan baik, dianalisa dengan sempurna serta dapat diarahkan menuju kesimpulan dan hasil yang akan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam tujuan kegiatan ini. Untuk itu disusun kuesioner untuk setiap jenis responden secara seksama sehingga akan memudahkan dalam proses entry data, pengolahan data dan analisa data.

Tabel 2.1 Data sekunder dan sumber data

No.	Komponen IPM/Atribut	Sumber Data	Pemilik Data
1	Kesehatan: AHH	Sensus Penduduk (SP) 2010	Badan Pusat Statistik (BPS)
2	Pengetahuan: RLS & HLS	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR 2020	Badan Pusat Statistik (BPS)
3	Pengetahuan: HLS	Daftar Pesantren se-Kota Depok	Kementerian Agama
4	Pengeluaran	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul 2020	Badan Pusat Statistik (BPS)
5	Auxiliary Variables	Kota Depok dalam Angka 2020	Badan Pusat Statistik (BPS)
6	Auxiliary Variables	Potensi Desa (Podes) 2020	Badan Pusat Statistik (BPS)

Untuk kegiatan survei ini, ada 2 (dua) macam kuesioner yang digunakan sesuai dengan tujuannya, yaitu:

1) kuesioner untuk rumah tangga,
2) kuesioner untuk instansi terkait

2.2.2 Pemilihan lokasi dan objek survei

a. Pemilihan Lokasi Survei

Survei dilakukan di seluruh kecamatan di wilayah Kota Depok. Namun demikian, survei tidak dilakukan di seluruh kelurahan dengan pertimbangan karena sesungguhnya banyak kelurahan yang memiliki karakteristik yang sama. Untuk kelurahan yang relatif sama karakteristiknya, diwakili oleh kelurahan lain yang sejenis. Pemilihan kelurahan lokasi survei telah mempertimbangkan keterwakilan kecamatan sehingga dapat dilakukan pendugaan Indeks Pembangunan Manusia pada tingkat kota dengan tingkat akurasi tertentu.

Selain itu lokasi survei juga ditentukan dengan mengacu pada keterwakilan level kecamatan serta kendala-kendala tertentu (terutama keterbatasan biaya) yang menjadi pertimbangan dalam kegiatan survei ini. Sedangkan metode penentuan ukuran sampel dibuat sedemikian rupa agar pelaksanaan survei dapat efisien dan efektif yang berorientasi pada biaya dan waktu dengan tetap mengikuti kaidah-kaidah statistik yang sah dan handal. Disain penentuan lokasi dan obyek survei secara ringkas disajikan pada Gambar 2.1.

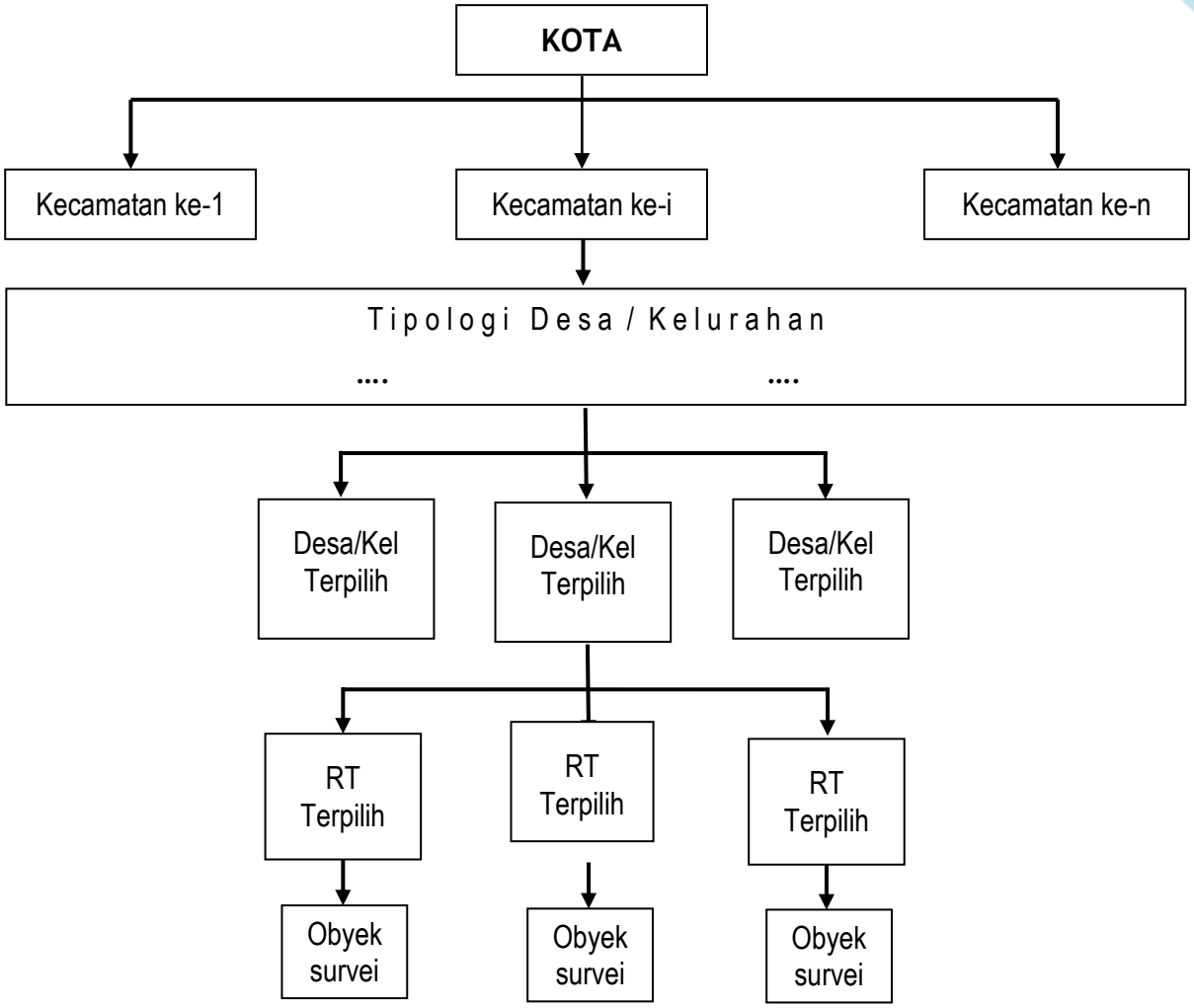

Gambar 2.1 Disain Penentuan Obyek Survei dan Lokasinya

Dengan mempertimbangkan beragamnya kondisi kelurahan, maka sebelum pemilihan kelurahan, terlebih dahulu dilakukan pengklasteran (*clustering*) kelurahan berdasarkan indikator penting yang erat kaitannya dengan besaran Indeks Pembangunan Manusia.

Pengklaskteran ini dimaksudkan agar kelurahan yang memiliki sifat yang mirip akan berada dalam satu klaster. Karena pendugaan dilakukan pada level kecamatan, maka setiap klaster yang ada di dalam kecamatan harus diwakili oleh minimum satu kelurahan yang sudah mencangkup karakteristik klaster yang terbentuk. Jumlah kelurahan pada masing-masing kecamatan di Kota Depok disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Sebaran Banyak Kelurahan Setiap Kecamatan di Kota Depok

No	Kecamatan	Banyak Kelurahan
1	Kecamatan Pancoran Mas	6
2	Kecamatan Cimanggis	6
3	Kecamatan Sawangan	7
4	Kecamatan Limo	4
5	Kecamatan Sukmajaya	6
6	Kecamatan Beji	6
7	Kecamatan Cipayung	5
8	Kecamatan Cilodong	5
9	Kecamatan Cinere	4
10	Kecamatan Tapos	7
11	Kecamatan Bojongsari	7
Total		**63**

Untuk penentuan lokasi survei di tingkat kecamatan diberlakukan ketentuan bahwa setiap ibu kota kecamatan adalah lokasi survei terpilih dengan pertimbangan di ibu kota kecamatan terdapat obyek survei yang lebih variatif dan ukuran/jumlah obyek surveinya cukup besar sehingga diharapkan kelurahan tersebut dapat merepresentasikan beragam perilaku obyek survei yang ada di seluruh kecamatan. Kelurahan lainnya dipilih secara acak dari klaster kelurahan lainnya yang didistribusikan secara proporsional dengan menggunakan metode *random proportional to size*.

Selanjutnya, banyaknya sampel keluahan pada setiap kecamatan disajikan pada Tabel 2.3. Dengan cara seperti disebutkan sebelumnya, jumlah kelurahan yang menjadi lokasi survei adalah sebanyak 21 kelurahan.

Tabel 2.3 Sebaran Jumlah Sampel kelurahan

No	Kecamatan	Sampel Kelurahan
1	Kecamatan Pancoran Mas	2
2	Kecamatan Cimanggis	2
3	Kecamatan Sawangan	2
4	Kecamatan Limo	1
5	Kecamatan Sukmajaya	3
6	Kecamatan Beji	2
7	Kecamatan Cipayung	2
8	Kecamatan Cilodong	2
9	Kecamatan Cinere	1
10	Kecamatan Tapos	2
11	Kecamatan Bojongsari	2
Total		**21**

b. Pemilihan Objek Survei

Agar diperoleh penyusunan disain survei yang baik, maka dalam kegiatan ini juga digunakan dukungan data dasar. Data dasar ini antara lain dipergunakan untuk menentukan jumlah sampel yang mewakili populasi dengan besarnya *error* yang ditentukan dan dianggap wajar. Bentuk data dasar ini merupakan daftar obyek populasi yang akan disurvei. Data populasi yang akan digunakan adalah data yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang diakui pemerintah yaitu data yang dikeluarkan oleh BPS seperti data potensi desa. Pada Tabel 2.5 di bawah ini merupakan banyaknya penduduk pada masing-masing kecamatan yang tercantum pada Publikasi Kota Depok Dalam Angka Tahun 2021.

Berdasarkan cara pengambilan datanya, obyek-obyek survei tersebut dapat dikelompokkan atas :

1. Kelompok 1 merupakan obyek survei yang pengambilan sampelnya dilakukan pada kelurahan terpilih di setiap kecamatan, di mana kerangka sampelnya tersedia di setiap kelurahan. Obyek survei yang termasuk dalam kelompok ini adalah Rumah Tangga.
2. Kelompok 2 merupakan obyek survei yang pengambilan sampelnya di sengaja sesuai dengan ketersediaan data yang diperlukan dalalam penelitian. Kelompok ini adalah instansi terkait.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk setiap Kecamatan di Kota Depok

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)
1	Sawangan	187,4
2	Bojongsari	141,0
3	Pancoran Mas	249,7
4	Cipayung	177,9
5	Sukmajaya	255,4
6	Cilodong	174,5
7	Cimanggis	253,7
8	Tapos	269,9
9	Beji	172,8
10	Limo	119,7
11	Cinere	101,4
Total		**2.103,2**

2.2.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung (*face-to-face*) menggunakan instrumen kuesioner terstruktur. Instrumen ini dibuat untuk setiap obyek survei.

a. Metode Sampling

Survei dilakukan untuk memperoleh dugaan Indeks Pembangunan Manusia Kota Depok dengan akurasi yang tinggi dan terukur. Sehingga metode sampling yang digunakan harus berbasis pada kaidah peluang (*probability sampling*).

Agar data yang diperoleh dalam suatu survei akurat dalam melakukan inferensi terhadap populasi, maka error yang dihasilkan diharapkan sekecil mungkin. Error yang timbul dalam suatu survei secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu sampling error dan non sampling error. Sampling error adalah error yang timbul karena kita tidak mengambil seluruh anggota populasi, melainkan hanya sebagian atau sampel saja. Sedangkan non sampling error adalah error yang bersumber bukan karena faktor sampel, misalnya karena kesalahan alat ukur, kesalahan wawancara, non respons, kesalahan entri data, dan lain-lain.

Agar error yang dihasilkan sekecil mungkin diperlukan metode sampling yang tepat. Walaupun demikian, apapun metode sampling yang dipilih tetap akan diperoleh error, yang disebut sampling error. Sampling error ini akan mengecil jika jumlah sampel diperbanyak. Di lain pihak, penambahan jumlah sampel berakibat pada potensi meningkatnya non sampling error. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode penentuan jumlah sampel yang minimum tetapi optimal. Secara ringkas hubungan antara ukuran sampel dengan kesalahan pendugaan (error) disajikan pada Gambar 2.2.

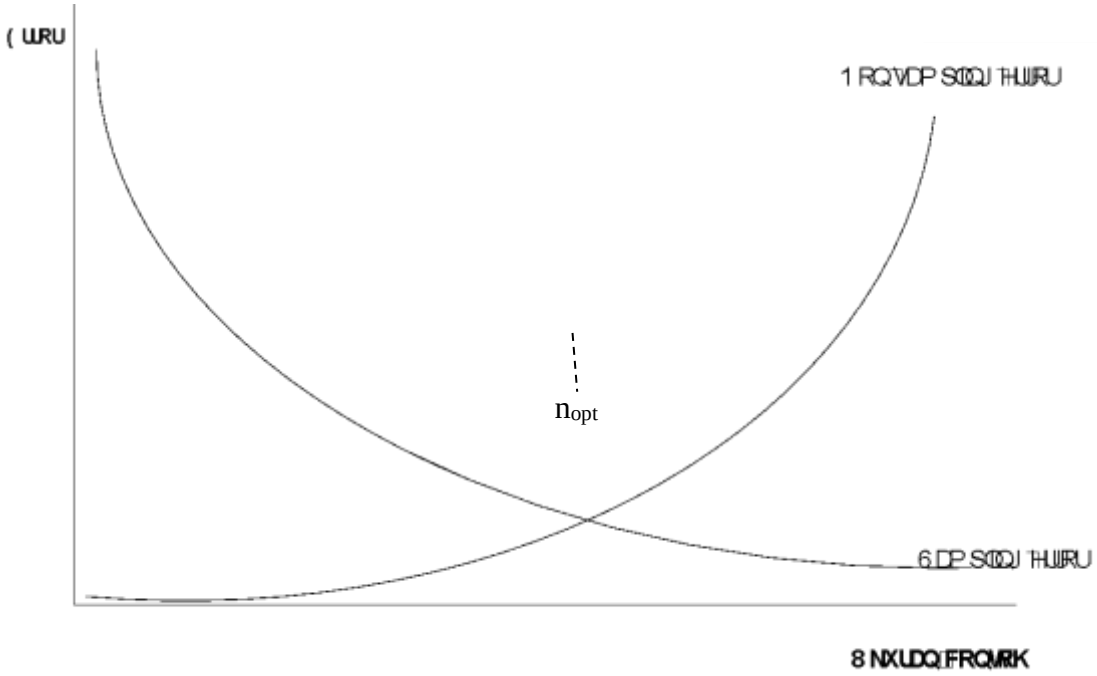

Gambar 2.2 Hubungan antara ukuran contoh (sampel) dengan *error* pendugaan

b. Rancangan Penarikan Contoh

Penarikan contoh tingkat Kota Depok dilakukan dengan stratifikasi pada level kecamatan. Kondisi keberagaman kelurahan pada setiap kecamatan juga dijadikan dasar dalam membentuk strata kelurahan menjadi dua strata. Agar kelurahan yang terpilih dapat menggambarkan kondisi keragaman pada level kota, maka kelurahan yang terpilih di setiap kecamatan ditetapkan minimum sebanyak 2 buah yang mewakili masing-masing klaster yang terbentuk. Setelah penentuan kelurahan yang menjadi lokasi survei, selanjutnya adalah memilih obyek survei di tingkat kelurahan (rumah tangga) dengan menggunakan metode *systematic random sampling*.

Tahap awal yang dilakukan untuk memilih obyek survei rumah tangga adalah pemilihan blok survei (6 RT) secara acak sistematik dari kerangka sampel. Kerangka sampel ini diperoleh dari kelurahan terpilih. Selanjutnya dari RT terpilih dipilih 5 rumah tangga secara sistematik (*systematic random sampling*) dari *listing* yang ada di RT setempat atau *listing* mandiri. Skema *systematic random sampling* disajikan pada Gambar 2.3 berikut ini.

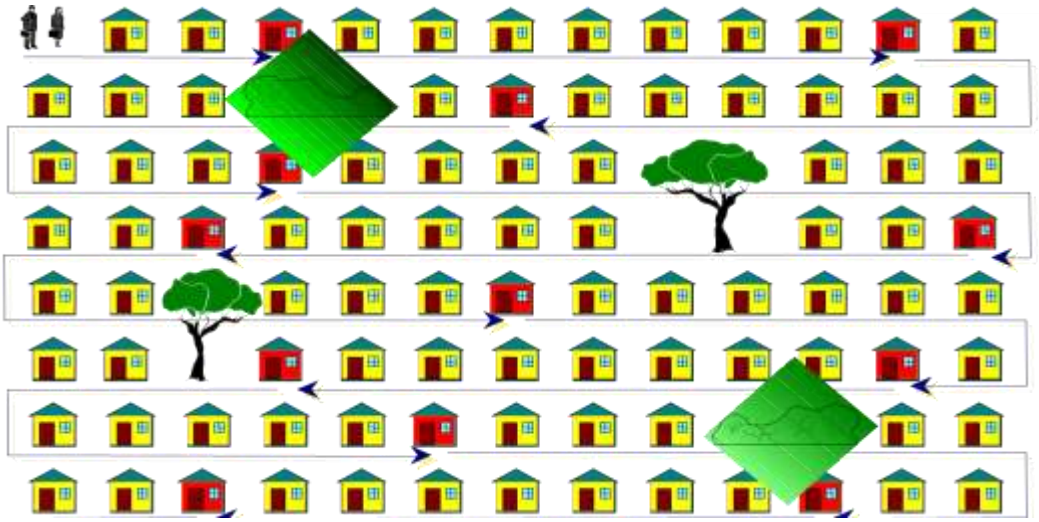

Gambar 2.3 Skema *systematic random sampling*

a. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan survey rumah tangga dilaksanakan pada bulan Juli 2021 yang terbagi menjadi 7 tim. Masing-masing tim mendapatkan lokasi survey sebanyak 3 kelurahan.

2.3 Metode Penjaminan Mutu Data

Seperti dijelaskan sebelumnya, error yang timbul dari suatu survei disamping sampling error, juga ada non sampling error. Pada survei yang berskala besar, kalau tidak dikendalikan dengan baik non sampling error yang timbul biasanya sangat besar. Oleh karena itu diperlukan manajemen penjaminan mutu untuk mengendalikannya. Kegiatan *Quality Assurance* (QA) atau *Quality Control* (QC) dilakukan sebagai bentuk kontrol atas kualitas data yang diperoleh dari obyek survei. Agar data yang diperoleh dari obyek survei akurat/valid, maka dilakukan penjaminan mutu data secara bertahap dan bertingkat mulai dari persiapan survei, pelaksanaan survei dan entry data.

2.3.1 Persiapan Survei

Sebelum dilakukan survei, terlebih dahulu dilakukan pelatihan (*coaching*) kepada surveyor. Pelatihan ini dimaksudkan untuk menjamin surveyor melakukan tugasnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam SOP pelaksanaan survei. Materi

yang disampaikan dalam pelatihan ini meliputi gambaran umum latar belakang dilakukan survei, pentingnya data yang berkualitas, manfaat yang diperoleh dari hasil survei yang berkualitas, etika melakukan wawancara, cara mendapatkan data yang akurat dari setiap obyek survei dan kelengkapan dokumen hasil survei. Diharapkan dari hasil pelatihan ini diperoleh surveyor yang memiliki integritas dan profesional serta terhindar dari perilaku curang (*cheating*) yang kemungkinan dilakukan oleh surveyor. Untuk menjamin pelaksanaan survei berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, setiap pelaksana survei juga dibekali dengan SOP/Panduan Pelaksanaan Survei, Panduan Wawancara, Panduan Pengisian Kuesioner, Panduan Pelaksanaan Listing dan Panduan Entri Data.

2.3.2 Pelaksanaan Survei

Ujung tombak dari suatu survei adalah pelaksanaan survei itu sendiri. Jika suatu survei ter-*manage* dengan baik maka kualitas data yang diperoleh juga akan tinggi. Dalam survei ini akan dilakukan manajemen secara bertingkat untuk menjamin kualitas data yang dikumpulkan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung kepada responden di tempat obyek survei berada, menggunakan instrumen kuesioner yang dibuat secara terstruktur disertai dengan pertanyaan-pertanyaan penyaring yang memungkinkan surveyor dapat dengan mudah mengetahui apakah ada ketidakkonsistenan jawaban responden.

Pada tingkatan berikutnya, untuk menjamin data yang dikumpulkan berkualitas, diperlukan Kordinator Surveyor. Kordinator Surveyor ini bertugas menjamin surveyor menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Di samping itu juga, Kordinator Surveyor bertugas menjamin mutu data yang dikumpulkan oleh surveyor melalui verifikasi data yang dikumpulkan. Jika ada data yang dikumpulkan oleh surveyor yang tidak diisi atau tidak akurat/valid, maka Kordinator Surveyor berhak untuk mengembalikan form kuesioner kepada surveyor untuk survei ulang atau perbaikan-perbaikan agar data yang dikumpulkan lebih akurat.

Kuesioner yang dianggap valid/akurat oleh kordinator surveyor, selanjutnya dikumpulkan oleh kordinator surveyor dan diserahkan pada supervisor di tingkat kelurahan. Supervisor di tingkat kelurahan selanjutnya memverifikasi keakuratan

data yang dikumpulkan oleh surveyor. Jika masih ada data yang tidak terisi atau tidak akurat/valid maka kuesioner dikembalikan kepada kordinator surveyor untuk selanjutnya diserahkan kepada surveyor dan dilakukan perbaikan-perbaikan atau survei ulang. Kuesioner yang dianggap valid/akurat oleh Supervisor di tingkat kelurahan selanjutnya diserahkan kepada petugas entry untuk dilakukan proses entry data.

Kuesioner yang digunakan dalam pengambilan data terdiri dari 8 (delapan) blok antara lain keterangan tempat (blok I), keterangan pencacahan (blok II), ringkasan (blok III), keterangan demografi (blok IV), keterangan imigrasi, akta kelahiran dan Pendidikan (blok V), pengeluaran (blok VI), rekapulasi pengeluaran (blok VII), pendapatan dan penerimaan (blok VIII).

2.3.3 Entry Data

Entry data dilakukan di setiap kelurahan wilayah survei. Form entry data dibuat menggunakan program EpiData (*open source*). Penggunaan EpiData untuk entri data dilakukan karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh EpiData. Kelebihan dari EpiData antara lain ukurannya kecil, mudah dioperasikan, tampilannya sesuai dengan kuesioner dan ada fasilitas penyaringan (*filter*). Untuk menjamin kualitas data yang dientri pun, program EpiData melakukan penyaringan-penyaringan, sehingga data-data entri yang mungkin tidak akurat karena human error tidak dapat diterima (tidak terisi) oleh program ini. Karena ukurannya yang kecil, hasil entry dari program EpiData ini juga sangat memudahkan pengiriman data dari kelurahan ke server pusat melalui jaringan internet. Untuk selanjutnya, data hasil entry kiriman dari seluruh kelurahan digabung di pusat.

2.4 Analisa Data

Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan data cleaning. Data cleaning dilakukan untuk mengantisipasi kesalahan yang masih terjadi dalam proses entry data yang masih lolos dari penyaringan-penyaringan yang dilakukan program tersebut. Setelah data benar-benar telah dinyatakan valid, selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data yang dilakukan meliputi statistika deskriptif, pendugaan langsung Indeks Pembangunan Manusia tingkat kota, dan pendugaan

tidak langsung Indeks Pembangunan Manusia tingkat kecamatan. Analisis data dilakukan dengan bantuan program SAS dan R.

2.4.1 Statistika Deskriptif

Analisis ini digunakan untuk menggambarkan kondisi masyarakat responden secara umum dari sisi faktor-faktor penentuan Indeks Pembangunan Manusia. Penyajian hasil analisis menggunakan tabel-tabel frekuensi dan grafik yang memudahkan diperoleh informasi mengenai pola kondisi masyarakat.

2.4.2 Pendugaan langsung Indeks Pembangunan Manusia tingkat kota

Untuk melakukan pendugaan langsung Indeks Pembangunan Manusia tingkat Kota, memanfaatkan data faktor-faktor yang diteliti dari objek survei rumah tangga yang telah diambil sampel. Pendugaan ini dilakukan secara langsung dari data survey yang diperoleh.

2.4.3 Pendugaan tak langsung Indeks Pembangunan Manusia tingkat kecamatan

Untuk melakukan pendugaan tak langsung Indeks Pembangunan Manusia tingkat kecamatan, memanfaatkan data faktor-faktor yang diteliti dari objek survei rumah tangga yang telah diambil sampel dan data sekunder dari data potensi desa (BPS). Metode yang digunakan ialah *small area estimation* yang pada dasarnya memanfaatkan informasi dari data yang tersurvei serta data lain di luar survei yang dapat menunjang hasil penelitian.

2.5 Perhitungan IPM Level Kecamatan

Perhitungan IPM memerlukan data yang dirumuskan dalam Tabel 2.6.

Tabel 2.5 Sumber data dalam pengukuran IPM

No.	Komponen IPM/Atribut	Sumber Data
1	Angka Harapan Hidup	Proyeksi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan data primer
2	Rata-rata Lama Sekolah	SAE berdasarkan Susenas dan data primer serta auxiliary variable
3	Harapan Lama Sekolah	SAE berdasarkan Susenas dan data primer serta auxiliary variable serta faktor koreksi pesantren
4	Pengeluaran per kapita	SAE berdasarkan Susenas dan data primer serta auxiliary variable (pendekatan lognormal distribution)

IPM mengukur pencapaian rata-rata suatu regional berdasarkan tiga aspek utama yaitu kesehatan, pengetahuan dan standar hidup. Dimensi atau indikator pembentuk IPM adalah

- Kesehatan : Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir
- Pengetahuan : Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)
- Standar hidup : Pengetahuan per Kapita

Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH dihitung dari hasil proyeksi Sensus Penduduk (SP) tahun 2010. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani Pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas, dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren yaitu dari Direktorat Pendidikan Islam.

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012 = 100. Perhitungan paritas daya beli menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungannya menggunakan Metode Rao.

Indeks pembangunan manusia diperhitungkan dari persamaan-persamaan berikut :

Perubahan Metodologi IPM

Alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM.

a. Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik.
b. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
c. Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Perubahan tersebut meliputi:

a. Angka melek huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah .

b. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.
c. Metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Keunggulan metode baru tersebut adalah penggunaan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif):

a. Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.
b. PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Penggunaan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Menghitung Indeks Komponen

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran. Rumus yang digunakan sebagai berikut.

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

Implementasi Ipm Metode Baru di Indonesia

a. Angka harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010-SP2010, Proyeksi Penduduk)
b. Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional-SUSENAS)
c. PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS.
d. Penentuan nilai maksimum dan minimum menggunakan Standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah.

Perbandingan Metode Lama dan Metode Baru

Dimensi	Metode Lama		Metode Baru	
	UNDP	BPS	UNDP	BPS
Kesehatan	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
Pengetahuan	Angka Melek Huruf (AMH)	Angka Melek Huruf (AMH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Harapan Lama Sekolah (HLS)
	Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup Layak	PDB per kapita (PPP US$)	Pengeluaran per kapita Disesuaikan (Rp)	PNB per kapita (PPP US$)	Pengeluaran per kapita Disesuaikan (Rp)
Agregasi	Rata-rata Aritmatik $IPM=\frac{1}{3}(I_{kesehatan}+I_{pendidikan}+I_{pengeluaran})x100$		Rata-rata Geometrik $IPM=\sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}\ x100$	

Penentuan Nilai Minimum dan Maksimum

Dalam menghitung IPM, diperlukan nilai minimum dan maksimum untuk masing-masing indikator. Berikut tabel yang menyajikan nilai-nilai tersebut.

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	20	20	85	85
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP U$)	1.007.436 * (Rp)	107.721 (PPP U$)	26.572.352 ** (Rp)

Keterangan:

* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua

** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

Variabel dalam IPM Metode Baru:

Angka Harapan Hidup Saat Lahir - AHH (Life Expectancy - LE)

Angka Harapan Hidup saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.

Rata-rata Lama Sekolah - RLS (Mean Years of Schooling - MYS)

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Angka Harapan Lama Sekolah - HLS (Expected Years of Schooling - EYS)

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purcashing Power Parity*-PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.

Penghitungan Paritas Daya Beli

Dihitung dari bundel komoditas makanan dan nonmakanan.

Rumus Penghitungan Paritas Daya Beli (PPP)

Pengelompokan IPM

Untuk melihat capaian IPM antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokkan IPM ke dalam beberapa kategori, yaitu:

IPM < 60 : IPM rendah

60 ≤ IPM < 70 : IPM sedang

70 ≤ IPM < 80 : IPM tinggi

IPM ≥ 80 : IPM sangat tinggi

$$\Rightarrow I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

$$\Rightarrow I_{pengetahuan} = \frac{I_{RLS} + I_{HLS}}{2} \quad \begin{cases} I_{RLS} = \dfrac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}} \\ I_{HLS} = \dfrac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}} \end{cases}$$

$$\Rightarrow I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pengetahuan} \times I_{pengeluaran}}$$

BAB III
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KECAMATAN KOTA DEPOK

3.1 Urgensi IPM

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar :

1. Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life)
2. Pengetahuan (knowledge)
3. Standar hidup layak *(decent standard of living)*

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Begitu pentingnya dimensi “manusia” dalam pembangunan, pembangunan manusia menjadi prioritas utama melalui penerapan berbagai strategi pembangunan yang penekanannya tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pembangunan manusia menurut UNDP (1990), adalah proses memperluas pilihan- pilihan penduduk (*Enlarging the choices of people*). Terdapat tiga pilihan dari sekian banyak pilihan yang dianggap relevan, yaitu sehat dan berumur panjang, berpendidikan, dan berkemampuan untuk akses ke sumber daya yang dapat memenuhi standar hidup layak. Dengan demikian jelas bahwa pertumbuhan ekonomi (peningkatan pendapatan) bukan satu-satunya pilihan agar manusia dapat hidup sejahtera dan menjadi manusia yang berkualitas.

Untuk mengukur ketiga pilihan utama tersebut, digunakan indeks komposit berdasarkan tiga parameter. Ketiga parameter tersebut adalah: Pertama, derajat kesehatan dan berumur panjang yang diukur dengan angka harapan hidup (*life expectancy rate*), mengukur keadaan sehat dan berumur panjang. Kedua, pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah dan rata-rata harapan lama sekolah, mengukur manusia yang cerdas, trampil, terdidik dan bertaqwa. Ketiga, pendapatan yang diukur dengan daya beli masyarakat (*purchasing power parity*); mengukur manusia yang mandiri dan memiliki akses untuk hidup layak.

3.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok

Dari hasil kegiatan Analisis IPM Tahun 2021 dapat menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat Kota Depok, sehingga data Analisis IPM Tahun 2021dapat dipergunakan untuk menghitung IPM Kota Depok Tahun 2021. Namun demikian angka IPM Kota Depok ini masih bersifat sementara karena penghitungan secara nasional dilakukan pada tahun setelahnya.

IPM Kota Depok Tahun 2021 naik apabila dibandingkan dengan angka IPM di tahun sebelumnya menjadi 81.02. Angka Harapan Hidup Kota Depok sebesar 74.48 tahun yang artinya anak yang lahir pada tahun 2021 ini mempunyai harapan hidup sampai dengan umur 74.48 tahun. Rata-rata lama sekolah 11.32 tahun artinya masyarakat Kota Depok yang berumur 25 tahun keatas rata-rata lama sekolah selama 11.32 tahun atau sampai dengan kelas 2 SMA. Rata-rata harapan lama sekolah penduduk berumur 7 tahun ke atas sebesar 13.94 tahun artinya penduduk berumur 7 tahun keatas mempunya harapan akan bersekolah sampai dengan tingkat 2 di perguruan tinggi. Pengeluaran per kapita sebesar Rp. 15.319 ribu per tahun artinya bahwa masyarakat Kota Depok tahun 2021 mengeluarkan uang untuk konsumsi sebesar Rp. 15.319 ribu setiap orang selama satu tahun yang telah disesuaikan.

Tabel 3.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok

Tahun 2016 – 2021*

Tahun	IPM	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Perkapita (Rp. Ribu)
2016	79.60	74.01	13.86	10.76	Rp. 14,560.00
2017	79.83	74.04	13.87	10.84	Rp. 14,727.00
2018	80.29	74.17	13.90	10.85	Rp. 15,262.00
2019	80.82	74.31	13.91	11.00	RP. 15,696.00
2020	80.97	74.44	13.92	11.28	Rp. 15,281.00
2021*	81.02	74.48	13.94	11.32	Rp. 15,319.00

*) Angka sementara, hasil prediksi berbasis pemodelan statistika berdasarkan data-data dari BPS

Tugas pemerintah dan masyarakat Kota Depok semakin bertambah berat untuk meningkatkan angka IPM ini di tahun tahun mendatang. Masih diperlukan kerja keras untuk melaksanakan kegiatan kegiatan di bidang kesehatan, pendidikan dan sosial ekonomi yang dapat meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat di Kota Depok. Jangan sampai terjadi di Kota Depok yang mempunyai IPM tinggi di Jawa Barat tetapi masih hal-hal yang tidak mencerminkan hal di atas seperti putus sekolah, ketidakberdayaan masyarakat dalam berobat, dan lain-lain. Mereka adalah harapan di masa depan yang harus kita perjuangkan di masa kini. Modal sosial dan kerjasama yang baik dari semua pihak sangat diharapkan untuk membangun Kota Depok yang tercinta ini.

3.3 Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup di sebelas kecamatan di Kota Depok sangat bervariasi. Walaupun secara umum sudah mencapai tingkat harapan hidup yang tinggi. Secara keseluruhan Kota Depok mempunyai angka harapan hidup waktu lahir di tahun 2021 sebesar 74.48 tahun. Artinya warga Kota Depok yang lahir di tahun 2021 mempunyai harapan hidup lebih dari 74.48 tahun.

Tingginya angka harapan hidup di Kota Depok sangat ditunjang dengan sarana dan prasarana kesehatan yang sudah memadai. Kondisi yang sudah bagus ini tentu saja harus dipertahankan dan bila perlu bisa ditingkatkan lagi. Dengan

palayanan prima dari petugas kesehatan serta ditunjang dengan adanya BPJS Kesehatan diharapkan bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakan Kota Depok di masa yang akan datang.

Angka Harapan Hidup (AHH) kecamatan yang paling tinggi adalah umur harapan hidup di Kecamatan Sukmajaya sebesar 77.59 dan yang paling rendah adalah umur harapan hidup di Kecamatan Cipayung sebesar 70.65. Dari umur harapan hidup ini maka pemerintah Kota Depok dapat menetapkan prioritas kesehatan di Kecamatan Cipayung tanpa meninggalkan kecamatan yang lain.

Kemajuan atau peningkatan umur harapan hidup di setiap kecamatan sangat ditunjang oleh adanya peningkatan di bidang kesehatan. Masyarakat sangat mengharapkan kemudahan dalam pelayanan kesehatan dengan biaya yang serendah mungkin dengan menggiatkan program Posyandu dan RW siaga. Posyandu merupakan kepanjangan tangan pemerintah di bidang kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Dengan giatnya kegiatan Posyandu diharapkan masyarakat dapat mendapatkan pelayanan kesehatan sedini mungkin.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap umur harapan hidup adalah faktor kebersihan lingkungan dan kelengkapan sarana yang menunjang, seperti misalnya ketersediaan jamban keluarga dan tempat pembuangan sampah akhir yang jauh dari pemukiman tempat tinggal. Usaha untuk menjaga kebersihan ini hendaknya diajarkan sedini mungkin di rumah dan di sekolah-sekolah kepada murid-murid misalnya dengan pemilahan sampah.

Tabel 3.2 Angka Harapan Hidup Kota Depok yang Dirinci Berdasarkan Kecamatan Tahun 2016-2021* (dalam Tahun)

No.	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
1.	Beji	71.94	71.99	72.04	72.08	72.21	72.24
2.	Bojongsari	71.53	71.60	71.67	71.70	71.83	71.86
3.	Cilodong	76.30	76.34	76.39	76.42	76.55	76.59
4.	Cimanggis	76.43	76.48	76.54	76.57	76.70	76.75
5.	Cinere	74.40	74.48	74.55	74.58	74.71	74.75
6.	Cipayung	70.32	70.39	70.46	70.49	70.61	70.65
7.	Limo	71.90	71.97	72.05	72.07	72.20	72.23

8.	Pancoran Mas	70.97	71.02	71.07	71.10	71.22	71.26
9.	Sawangan	70.54	70.56	70.59	70.62	70.74	70.78
10.	Sukmajaya	77.26	77.32	77.38	77.41	77.55	77.59
11.	Tapos	72.01	72.08	72.15	72.18	72.31	72.35
Kota Depok		**74.01**	**74.04**	**74.17**	**74.31**	**74.44**	**74.48**

*) Angka sementara, hasil prediksi berbasis pemodelan statistika berdasarkan data-data dari BPS

Kondisi yang mengurangi derajat kesehatan masyarakat perkotaan yang tidak kalah penting adalah terpaparnya polusi asap kendaraan bermotor. Alangkah sehatnya apabila udara di Kota Depok bebas dari polusi udara. Salah satu langkah yang bisa dilakukan pemerintah Kota Depok antara lain dengan pembatasan kendaraan bermotor yang berpolusi dengan adanya Uji Emisi gas buang kendaraan. Apabila hal ini sudah terlaksana bisa lebih ditingkatkan lagi.

3.4 Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah untuk masyarakat Kota Depok berumur 25 tahun keatas tahun 2021 terlihat pada tabel di bawah ini. Rata-rata lama sekolah yang tertinggi ada di Kecamatan Cinere mencapai 13.20 tahun artinya rata-rata kuliah tingkat dua. Kecamatan yang mencapai rata-rata lama sekolah yang cukup tinggi selanjutnya adalah Sukmajaya yaitu mendekatai 12 tahun artinya lama sekolah penduduk yang berumur 25 tahun keatas sampai dengan kelas 12 atau kelas 3 SLTA. Sementara terendah angka rata-rata lama sekolah ada di Kecamatan Bojongsari. Rata-rata lama sekolah di kecamatan tersebut sekitar 10.52 tahun atau hampir sampai dengan kelas 2 SLTA.

Secara umum angka rata-rata lama sekolah penduduk berumur 25 tahun keatas di Kota Depok adalah sampai dengan kelas 2 SLTA. Hal ini bisa menjadi perhatian Pemerintah Kota Depok untuk dapat menetapkan prioritas pendidikan dengan lebih memudahkan masyarakat misalnya pendidikan gratis sampai dengan SLTA sebab jumlah Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Depok sangat tidak sebanding dengan banyaknya murid yang harus sekolah sementara sekolah di SLTA swasta memerlukan dana yang cukup bahkan mungkin mahal sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan kecil. Namun sekarang dengan

adanya berbagai bantuan pendidikan baik dari pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan angka rata-rata lama sekolah di Kota Depok.

Tabel 3.3 Rata-rata Lama Sekolah di Kota Depok Berdasarkan Kecamatan Tahun 2016-2021* (dalam Tahun)

No.	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
1.	Beji	10.35	10.39	10.36	10.46	10.72	10.81
2.	Bojongsari	10.01	10.07	10.05	10.17	10.43	10.52
3.	Cilodong	11.04	11.10	11.09	11.22	11.51	11.60
4.	Cimanggis	11.20	11.29	11.31	11.47	11.76	11.85
5.	Cinere	11.96	12.24	12.43	12.78	13.10	13.20
6.	Cipayung	10.66	10.68	10.61	10.70	10.97	11.06
7.	Limo	11.01	11.10	11.14	11.31	11.59	11.68
8.	Pancoran Mas	10.84	10.81	10.73	10.77	11.05	11.14
9.	Sawangan	10.32	10.31	10.24	10.30	10.56	10.65
10.	Sukmajaya	11.27	11.39	11.42	11.61	11.90	11.99
11.	Tapos	11.03	11.20	11.30	11.55	11.84	11.93
Kota Depok		**10.76**	**10.84**	**10.85**	**11.00**	**11.28**	**11.32**

*) Angka sementara, hasil prediksi berbasis pemodelan statistika berdasarkan data-data dari BPS

3.5 Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah di Kota Depok tahun 2021 sebesar 13.94, artinya penduduk Depok diharapkan dapat bersekolah selama 13.94 tahun atau sampai dengan Diploma II. Angka harapan lama sekolah senantiasa naik meskipun sedikit dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Demikian halnya pada tiap kecamatan juga naik dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Harapan lama sekolah tertinggi ada di Kecamatan Beji sebesar 15.01 atau hampir Sarjana/Diploma IV, disusul Kecamatan Pancoran Mas yaitu 14.98 atau hampir Sarjana/Diploma IV dan Kecamatan Cilodong sebesar 14.71 atau hampir Sarjana/Diploma IV. Sementara itu harapan lama sekolah terendah ada di Kecamatan Tapos sebesar 13.00 atau Diploma I, disusul Kecamatan Cinere sebesar 13.11 atau hampir Diploma I.

Tabel 3.4 Harapan Lama Sekolah di Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun 2016-2021* (dalam Tahun)

No.	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
1.	Beji	15.49	15.33	15.25	14.88	14.94	15.01
2.	Bojongsari	13.68	13.79	13.92	13.78	13.84	13.91
3.	Cilodong	13.63	13.57	13.55	14.58	14.64	14.71
4.	Cimanggis	14.18	14.11	14.07	13.78	13.84	13.91
5.	Cinere	13.01	13.06	13.15	12.98	13.04	13.11
6.	Cipayung	13.16	13.32	13.51	13.44	13.50	13.57
7.	Limo	13.93	14.08	14.25	14.15	14.21	14.28
8.	Pancoran Mas	13.98	13.88	13.83	14.85	14.91	14.98
9.	Sawangan	14.09	14.23	14.24	14.04	14.10	14.17
10.	Sukmajaya	14.69	14.61	14.55	14.23	14.29	14.36
11.	Tapos	13.21	13.16	13.14	12.87	12.93	13.00
Kota Depok		**13.86**	**13.87**	**13.90**	**13.91**	**13.92**	**13.94**

*) Angka sementara, hasil prediksi berbasis pemodelan statistika berdasarkan data-data dari BPS

3.6 Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran Perkapita disesuaikan di Kota Depok pada tahun 2021 sebesar Rp. 15.32 juta perkapita per tahun. Kecamatan Cinere adalah kecamatan dengan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan penduduknya paling besar yaitu sebesar Rp. 22.32 juta dan yang terkecil sebesar Rp. 11.10 juta yang berada di Kecamatan Cipayung. Daya beli masyarakat Kecamatan Cinere yang tertinggi tidak serta merta mencerminkan kesejahteraan keseluruhan penduduk Cinere. Ketimpangan pendapatan antar penduduk belum bisa dilihat dengan angka ini. Perlu penelitian lebih lanjut untuk melihat ketimpangan pendapatannya misalnya dengan menghitung *Gini Ratio*.

Tabel 3.5 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan di Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun 2016-2021* (dalam Rp. Ribu)

No.	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020	2021*

1.	Beji	15,649	15,791	16,323	16,748	16,404	16,544
2.	Bojongsari	12,278	12,449	12,931	13,330	13,077	13,209
3.	Cilodong	12,415	12,589	13,075	13,479	13,222	13,354
4.	Cimanggis	16,670	16,848	17,443	17,923	17,548	17,691
5.	Cinere	21,282	21,441	22,130	22,670	22,170	22,324
6.	Cipayung	10,400	10,509	10,877	11,174	10,978	11,104
7.	Limo	13,708	13,889	14,415	14,848	14,554	14,689
8.	Pancoran Mas	16,485	16,647	17,221	17,680	17,312	17,454
9.	Sawangan	12,730	12,899	13,389	13,792	13,526	13,659
10.	Sukmajaya	18,912	19,103	19,767	20,300	19,862	20,010
11.	Tapos	10,863	11,064	11,541	11,946	11,729	11,857
Kota Depok		**14,560**	**14,727**	**15,262**	**15,696**	**15,281**	**15,319**

*) Angka sementara, hasil prediksi berbasis pemodelan statistika berdasarkan data-data dari BPS

3.7 Indeks Pembangunan Manusia Kecamatan di Kota Depok

Tabel di bawah ini menyajikan Indeks Pembangunan Manusia per kecamatan dari tahun 2016 sampai tahun 2021. IPM Kota Depok Tahun 2021 naik apabila dibandingkan dengan angka IPM di tahun sebelumnya menjadi 81.02. Namun demikian angka IPM Kota Depok ini masih bersifat sementara karena penghitungan secara nasional dilakukan pada tahun setelahnya.

Nilai IPM tertinggi ada di Kecamatan Sukmajaya sebesar 87.19 disusul Kecamatan Cinere yaitu 86.78 dan Kecamatan Cimanggis sebesar 84.90. Sementara itu nilai IPM terendah ada di Kecamatan Cipayung sebesar 75.65 disusul Kecamatan Tapos sebesar 77.65.

Tabel 3.6 Indeks Pembangunan Manusia Kecamatan di Kota Depok

Tahun 2016-2021*

No.	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
1.	Beji	80.42	80.77	81.15	81.51	81.71	81.81
2.	Bojongsari	75.61	76.27	76.93	77.56	77.76	77.86
3.	Cilodong	79.20	79.72	80.23	82.05	82.26	82.36
4.	Cimanggis	83.03	83.55	84.07	84.58	84.79	84.90
5.	Cinere	84.13	84.97	85.81	86.46	86.67	86.78
6.	Cipayung	73.56	74.17	74.77	75.36	75.55	75.65
7.	Limo	78.34	79.10	79.85	80.58	80.78	80.88
8.	Pancoran Mas	79.54	79.87	80.21	81.90	82.11	82.21
9.	Sawangan	76.25	76.85	77.28	77.79	77.99	78.09
10.	Sukmajaya	85.30	85.83	86.36	86.87	87.08	87.19
11.	Tapos	75.31	76.00	76.69	77.35	77.55	77.65
Kota Depok		**79.60**	**79.83**	**80.29**	**80.82**	**80.97**	**81.02**

*) Angka sementara, hasil prediksi berbasis pemodelan statistika berdasarkan data-data dari BPS

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM dapat pula menjadi indikator untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah. Dalam hal ini IPM dianggap sebagai gambaran dari hasil program pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Demikian juga kemajuan program pembangunan dalam suatu periode dapat diukur dan ditunjukkan oleh besaran IPM pada awal dan akhir periode tersebut. IPM merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi yang sangat luas, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitasdan standar hidup layak. Namun untuk menyikapi data IPM dan komponennya tidak bisa secara parsial sehingga menghasilkan kebijakan yang salah.

Berdasarkan kajian dan analisis, IPM Kota Depok Tahun 2021 naik apabila dibandingkan dengan angka IPM di tahun sebelumnya menjadi 81.02. Angka Harapan Hidup Kota Depok sebesar 74.48 tahun yang artinya anak yang lahir pada tahun 2021 ini mempunyai harapan hidup sampai dengan umur 74.48 tahun. Rata-rata lama sekolah 11.32 tahun artinya masyarakat Kota Depok yang berumur 25 tahun keatas rata-rata lama sekolah selama 11.32 tahun atau sampai dengan kelas 2 SMA. Rata-rata harapan lama sekolah penduduk berumur 7 tahun ke atas sebesar 13.94 tahun artinya penduduk berumur 7 tahun keatas mempunya harapan akan bersekolah sampai dengan tingkat 2 di perguruan tinggi. Pengeluaran per kapita sebesar Rp. 15.319 ribu per tahun artinya bahwa masyarakat Kota Depok tahun

2021 mengeluarkan uang untuk konsumsi sebesar Rp. 15.319 ribu setiap orang selama satu tahun yang telah disesuaikan.

Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan komponen dari IPM tidak serta merta mengindikasikan bahwa daerah dengan AHH lebih tinggi, tingkat polusi daerah tersebut lebih rendah daripada daerah dengan AHH lebih rendah. Mobilitas penduduk yang sangat besar memberi arti bahwa penduduk tersebut tidak sepanjang hari bermukim di tempat tinggal mereka.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan jumlah tahun penduduk usia 7 tahun keatas menjalani pendidikan formal yang diharapkan dapat dicapai oleh penduduk Depok.

Namun perlu diingat bahwa IPM bukanlah satu-satunya alat ukur untuk menilai keberhasilan dalam pembangunan manusia. Karena dimensi pembangunan manusia yang diukur oleh IPM hanya meliputi tiga indikator saja, yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Aspek-aspek lain seperti kesehatan jender, tingkat partisipasi masyarakat, kesehatan mental dan lainnya. Sehingga evaluasi dalam pembangunan manusia perlu juga melihat indikator indikator lain, seperti Indeks Pembangunan Jender (IPJ), Indeks Pemberdayaan Jender (IDJ) dan IKM (Indeks Kemiskinan Manusia) sehingga kesimpulan yang didapat akan lebih mendekati fakta sebenarnya.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil kajian dan analisis perkembangan pembangunan manusia di Kota Depok, setiap kecamatan di Kota Depok perlu memperbaiki kualitas dari setiap komponen IPM yang telah dicapai khususnya pada beberapa daerah yang harus diprioritaskan. Dengan mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan, hasil yang dicapai dan kendala yang dihadapi maka penyusun mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

Agar dapat dibuat kebijakan yang tepat maka perlu dilakukan identifikasi faktor- faktor dominan yang menyebabkan akses terhadap pendidikan, kesehatan

dan aktivitas ekonomi kurang maksimal. Di bidang kesehatan misalnya, pemerintah Kota Depok perlu lebih intensif menggalakkan Posyandu dan RW siaga.

Pada sektor bidang pendidikan, upaya menaikkan rata-rata lama sekolah dapat ditempuh dengan mengkatifkan kejar paket A, paket B maupun paket C serta memastikan penduduk usia sekolah dapat bersekolah semuanya. Setelah mengikuti kejar paket A dan paket B, apabila masih terkejar umurnya, perlu dimasukkan kembali ke pendidikan formal. Perlu pula dilakukan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap arti penting pembangunan manusia. Diantaranya adalah meningkatkan peran semua komponen masyarakat untuk bersinergi meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

BAB V
TIM PENULISAN BUKU

Ketua	:	Dr. Kusman Sadik, SSi., MSi.
Anggota	:	1. Dr. Anang Kurnia, SSi., MSi.
		2. Dr. Farit M. Afendi, SSi., MSi.
		3. Gerry Alfa Dito, SSi., MSi.
		4. Rahmatin Nur Amalia, SSi.

DAFTAR PUSTAKA

Seidman, K. F. (2005). Economic Development Finance. Thousand Oaks: Sage Publications.

Howkins, J. (2002). The Creative Economy: How People Make Money from Ideas. Penguin Books Limited.

de Silva, I. and S. Sumarto. 2013. Poverty-growth inequality triangle: the case of Indonesia. TNP2K Working Paper. http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/WP4-PovertyTriangle(1).pdf

Chongvilaivan, A. and J. Kim. 2013. Individual income inequality and its drivers in Indonesia: A theil decomposition reassessment. Social Indicators Research. 1–20

Wan, G. and Z. Zhou. 2004. Income Inequality in Rural China: Regression-based Decomposition Using Household Data (No. 2004/51). WIDER Discussion Papers/World Institute for Development Economics (UNU-WIDER).

Bae, K., D. Han, and H. Sohn. 2012. Importance of Access to Finance in Reducing Income Inequality and Poverty Level. International Review of Public Administration 17 (1): 55–77.

World Bank. 2016. Indonesia's rising divide. Washington, DC: World Bank Group. http://documents.worldbank.org/curated/en/267671467991932516/Indonesias-rising-divide

Wicaksono E, Amir H, and Nugroho A. 2017. The Sources of Income Inequality in Indonesia: a Regression-Based Inequality Decomposition. ADBI Working Paper Series.

The Equality Trust. 2011. “Income inequality: Trends and Measures.” Equality Trust Research Digest; no.2: pp.1–8

Kemenparekraf. 2014.Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025. Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.